

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA SIULAK KECIL MUDIK KEC. SIULAK KAB. KERINCI)

**ASIH NORI MITRA, ANTRI MARIZA QADARSIH, ARIESKA,
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh**

Email :

tei.qadarsih@gmail.com
arieska.mkom@gmail.com
asihnm3@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the Implementation of the Family Hope Program (PKH) Policy. This type of research is descriptive qualitative research with purposive sampling technique as a determinant of research informants. The results of the study show that: For the communication indicator as a whole the results obtained are implemented, because the government has made every effort to maintain communication between the government and participants or members of the Family Hope Program (PKH). Any information that is available is always informed to the beneficiary community so that there are no mistakes in the implementation of this program. For the Resources indicator with human resource and facility assessment items, the overall results obtained are sufficiently implemented. Disposition indicators are in the quite implemented category. Because both the village government administrators of the family hope program and PKH assistants in the Siulak sub-district along with family program administrators at the social service carry out their duties according to their respective responsibilities. Even though there may be some mistakes made, they are always resolved properly. The Bureaucratic Structure indicator is in the quite implemented category. Because all the activities carried out in the implementation of this program are in accordance with the applicable procedures, carry out their duties to the maximum extent possible and in accordance with their respective responsibilities.

Key Words : *Implementation, Policy, Family Hope Program (PKH)*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH). Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif Deskriptif dengan Teknik *Purposive Sampling* sebagai penentu informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Untuk indikator Komunikasi secara keseluruhan hasil yang didapatkan ialah terlaksana, karna pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk tetap menjaga komunikasi antara pemerintah dengan peserta atau anggota program keluarga harapan (PKH). Setiap informasi yang ada selalu di informasikan kepada masyarakat penerima manfaat agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan program ini. Untuk indikator Sumber Daya dengan item penilaian sumber daya manusia dan fasilitas dari keseluruhan hasil yang didapatkan ialah cukup terimplementasi. Indikator Disposisi berada pada kategori cukup terimplementasi. Karna

baik pemerintah desa pengurus program keluarga harapan maupun pendamping PKH kecamatan Siulak beserta pengurus program keluarga di dinas sosial melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Walaupun mungkin ada beberapa kesalahan yang dilakukan tetapi hal tersebut selalu teratasi dengan baik. Untuk indikator Struktur Birokrasi berada pada kategori cukup terimplementasi. Karna semua kegiatan yang dijalankan dalam pelaksanaan kegiatan program ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin dan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH)

I. PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan yang saat ini dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dalam penanggulangan kemiskinan, salah satunya adalah PKH (Program Keluarga Harapan), PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang tidak mampu atau rumah tangga sangat miskin dengan kewajiban untuk melaksanakan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Dari segi kebijakan sosial, PKH adalah cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. PKH yang mewajibkan RTSM/KSM untuk memeriksa kesehatan ibu hamil dan menyediakannya imunisasi dan pemantauan perkembangan anak, termasuk menyekolahkan anak, akan membawa perubahan perilaku RTSM/KSM menjadi penting kesehatan dan pendidikan. Program Keluarga Harapan (PKH) Merupakan implementasi dari UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Bidang Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan, Peraturan Menteri Bidang Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Edisi Tahun 2021, Bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan Direktur Jenderal.

Provinsi Jambi juga menjadi salah satu pendukung pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH), berdasarkan pedoman umum PKH, Tujuan utama PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target Milenium Development Goals (MDGs).

Peran Pemerintahan Desa sangat penting dalam pendataan masyarakatnya yang masuk kategori tidak mampu dan layak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang selanjutnya didata ke Dinas Sosial Kabupaten. Kriteria masyarakat miskin yang menjadi penerima Program Keluarga Harapan

(PKH) dikabupaten kerinci adalah masyarakat yang terdata atau terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin di Dinas Sosial Kabupaten Kerinci yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan social.

Proses pemilihan masyarakat miskin yang menerima PKH di Kabupaten Kerinci yaitu Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Kerinci menerima data masyarakat miskin dari Dinas Sosial Kabupaten Kerinci, untuk selanjutnya pendamping melakukan sosialisasi dan validasi ke desa yang akan menerima manfaat dari program keluarga harapan. Tentunya yang akan menerima manfaat dari program ini yakni keluarga miskin yang memiliki salah satu komponen PKH yaitu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Di Kecamatan Siulak sudah menjalankan program tersebut yang mana tujuan utama dari program ini yaitu untuk mengurangi angka dan memutuskan rantai kemiskinan.

Dari Penelitian awal yang dilakukan ditemui ada masyarakat yang lebih layak untuk mendapatkan program ini tetapi mereka justru tidak mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini membuat masyarakat yang layak mendapatkan bantuan kehilangan kesempatan. Maka dari itu untuk melihat permasalahan tersebut lebih dalam, perlu mengkaji bagaimana Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Menurut Masmanian dan Sabatier (dalam jurnal Junine dkk, 2019:3) menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang–undang namun ada juga dalam bentuk keputusan atau perintah eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Dimana keputusan tersebut seharusnya mengidentifikasi masalah–masalah yang ingin diatasi, menyebutkan dengan tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan juga berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya.

Implementasi kebijakan menurut Goerge C. Edward dalam Dwiyanto (2017:31) menunjukkan empat aspek yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi dimana keempatnya saling berhubungan, yaitu sebagai berikut ;

a. Komunikasi

Bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakandengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan kelompok sasaran. Faktor komunikasi menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Ini berarti bahwa komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksanaan pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Dengandemikian komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten.

b. Sumber Daya

Setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai baik sumber daya finansial maupun sumber daya manusia. Kecukupan sumber daya finansial adalah kecukupan modal atau dana atas suatu program atau kebijakan yang akan dilakukan.

Kecukupan sumber daya manusia adalah kecukupan kualitas maupun kuantitas seorang implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran.

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturansuatu kebijakan, jika para personel yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

c. Sikap pelaksana (Disposisi)

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik: jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur pelaksana itu sendiri ketika struktur birokrasi tidak kondusif maka sumber daya menjadi tidak efektif dan kebijakan pun menjadi terhambat.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Edisi Tahun 2021, Bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan Direktur Jenderal.

Penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan komponen, yaitu komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki kriteria dengan rincian berikut :

1. Komponen Kesehatan

Kriteria penerima PKH komponen kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Ibu Hamil/nifas/menyusui.
- b. Anak Usia Dini

2. Komponen Pendidikan

3. Komponen Kesejahteraan Sosial

Kriteria penerima PKH komponen kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Lanjut usia
- b. Penyandang disabilitas berat

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dimulai dari lapangan yakni fakta empiris bukan dari deduksi teori. Oleh Sugiyono (2017:10) di dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data

tidak di pandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang di temukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Jadi, di dalam penelitian kualitatif melakukan analisis data untuk membangun hipotesis.

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Siulak Kecil Mudik Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci, yang mana desa ini sudah menjalankan Program keluarga Harapan. Peneliti tertarik melakukan penelitian di desadikarenakan desa ini termasuk salah satu desa yang masyarakatnya masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Jenis Dan Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Data Primer

Menurut Mestika Zed (2008 : 33), data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Manfaat utama dari data primer adalah bahwa unsur-unsur kebohongan tertutup terhadap sumber fenomena.

2. Data Sekunder Menurut Mestika Zed (2008:33)

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung berupa data-data yang telah ada seperti arsip-arsip, dokumen, artikel, serta laporan yang berhubungan dengan objek penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Nurmawi dan Martini (Afifudin dan Beni, 2012:134) observasi adalah pengamatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.

2. Wawancara / *Interview*

Wawancara merupakan metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek atau *checklist* apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan.

3. Dokumentasi

Metode atau teknik dokumenter ini adalah teknik pengumpulan data dan informasi-informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari berbagai literatur maupun dokumen yang menyimpan data data. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang luas mengenai pokok penelitian. (Afifudin dan Beni 2012;141)

Metode Analisis Data

Aktivitas dalam analisis data yakni :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Kegiatan utama dalam setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara Mendalam, dan Dokumentasi atau gabungan ketiganya (Triangulasi)

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, Sehingga diperlukan analisis data melalui reduksi data, reduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah men-*display*-kan data. Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

4. Penarikan Kesimpulan & Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah berikutnya menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Siulak Kecil Mudik, Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci bisa dilihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Goerge C. Edward dalam Dwiyanto (2017:31) yang mengatakan bahwa Implementasi kebijakan menunjukkan empat aspek yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi dimana keempatnya saling berhubungan, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan teori Goerge C. Edward tersebut empat aspek yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Siulak Kecil Mudik, berikut Pembahasan hasil penelitian:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan kepada orang lain. Implementasi program akan lebih efektif apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penulis menyimpulkan bahwasanya Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Siulak Kecil Mudik Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci) dilihat dari indikator komunikasi dengan dua item penilaian yaitu sosialisasi mengenai Persyaratan dan sosialisasi mengenai Peraturan program keluarga harapan sudah Cukup Terlaksana.

2. Sumber daya

Sumber daya adalah salah satu unsur atau bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan menurut Edward III, setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai baik sumber daya finansial maupun sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi penulis menyimpulkan bahwasanya dilihat dari indikator sumber daya dengan dua item penilaian yaitu sumber daya manusia dan fasilitas program keluarga harapan berada pada kategori “cukup terimplementasi”. Hal ini karena

semua para pelaksana program ini sudah lengkap dan bertanggung jawab. Untuk fasilitas sendiri dalam observasi yang dilakukan dilapangan, penulis melihat bahwa ada sedikit kendala yaitu tidak ada nya ATM Khusus bagi Penerima PKH, sehingga dalam hal Pengambilan Dana/Bantuan PKH harus mengambilnya langsung ke kantor pos yang lokasinya cukup jauh. Walaupun demikian, kendala tersebut dapat teratasi. Hal tersebut dapat kita lihat dari beberapa jawaban dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan para pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengurusan program keluarga harapan ini.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah faktor dalam pendekatan mengenai pelaksanaan kebijakan publik. Disposisi atau sikap sangatlah berpengaruh dalam melakukan kerjasama antara atasan, pendamping dan juga dengan masyarakat dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Jika suatu sikap yang baik akan berdampak positif bagi masyarakat ataupun sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penulis menyimpulkan bahwasanya kebijakan dilapangan cukup terlaksana, hal ini dikarenakan masyarakat penerima manfaat (KPM) melaksanakan dan mengikuti setiap prosedur yang berlaku dalam program keluarga harapan, walaupun dari jumlah semua masyarakat Desa Siulak Kecil Mudik yang mendapatkan bantuan program tersebut masih terdapat beberapa masyarakat yang mendapatkan bantuan tetapi mereka dapat dikategorikan masyarakat yang mampu. Sehingga bantuan dari program ini yang diutamakan bidang kesehatan dan pendidikan akan tetapi karna hal tersebut sudah terpenuhi oleh beberapa masyarakat yang dianggap mampu ini jadi mereka menggunakan bantuan tersebut untuk hal-hal lain diluar kesehatan dan pendidikan. Hal tersebut hanya dapat diatasi oleh masyarakat yang mampu tersebut dengan kesadaran diri sendiri untuk mengundurkan diri dari anggota penerima manfaat dari bantuan program keluarga harapan ini.

4. Disposisi

Struktur birokrasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau lembaga dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penulis menyimpulkan bahwasanya Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Siulak Kecil Mudik Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci) dilihat dari indikator struktur birokrasi dengan dua item penilaian yaitu Melaksanakan Tanggung Jawab Sesuai Tugas yang diberikan dan Melaksanakan Tugas Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tupoksinya berada pada kategori “Cukup terimplementasi”. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang layak menerima tetapi belum terdata sebagai penerima PKH, disamping itu dapat dilihat dari tanggapan responden yaitu masyarakat penerima manfaat itu sendiri pada jawaban saat wawancara yang diberikan bahwa para pelaksana kebijakan mampu melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-masing.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang menyangkut implementasi program keluarga harapan

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi kasus di desa siulak kecil mudik, kecamatan siulak, kabupaten kerinci) berdasarkan empat indikator yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk indikator komunikasi yang memiliki item penilaian yaitu sosialisasi mengenai persyaratan dan sosialisasi mengenai peraturan dari program keluarga harapan ini yang dilakukan oleh para pemerintah desa yang mengurus program ini, pendamping program keluarga harapan kecamatan Siulak dengan masyarakat penerima manfaat dari keseluruhan hasil yang didapatkan ialah Cukup terlaksana.
2. Untuk indikator sumber daya dengan item penilaian sumber daya manusia dan fasilitas dari keseluruhan hasil yang didapatkan ialah cukup terimplementasi.
3. Untuk indikator disposisi berada pada kategori cukup terimplementasi.
4. Untuk indikator struktur birokrasi berada pada kategori cukup terimplementasi.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Masmanian dan Sabatier (dalam jurnal Junine dkk, 2019:3) Tentang *Implementasi Kebijakan* Makmur dan Thahier, (2017) *Implementasi Kebijakan Publik. Bandung* : Truen RTH Bandung
- Goerge C. Edward dalam Dwiyanto (2017:31) *Implementasi Kebijakan Publik* Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Makmur dan Thahier, (2017) *Implementasi Kebijakan Publik. Bandung* : Truen RTH Bandung
- Edi Suharto (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial: Bandung*: Alfabeta
- Narbuko dan Achmadi (2020). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. Bumi Aksara
- Mestika Zed (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia
- Noeng Muhadjir (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi IV Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Masmanian dan Sabatier (dalam jurnal Junine dkk, 2019:3) Tentang *Implementasi Kebijakan* Rika Ismi Kasana, Dkk. 2021 Dalam Jurnal Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Loktabat Selatan
- Nikita Vidiana Senduk, Dkk. 2021 Dalam Jurnal Dampak Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado
- Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- Buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2021